

**EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI BAGIAN UNIT PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



oleh :

**Aang Sumarna
NIM. 9981497 / M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bidang Pertanahan. Dalam Pelaksanaan pelayanannya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengacu pada peraturan tersebut. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya pelayanan pertanahan yang telah menjadi bagian di dalamnya tidak merubah alur kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Bentuk Unit Pelayanan Terpadu Bidang Pertanahan ini secara fisik hanya memindahkan loket pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ke kantor Unit Pelayanan Terpadu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja pelaksanaan pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi antara sebelum dan sesudah menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan sesudah menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh permohonan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi perbulan dengan klasifikasi satu tahun sebelum dan sesudah pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi. Jenis data yang diambil adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dan tanya jawab.

Kinerja Pelayanan yang dicapai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu dibandingkan dengan sebelum menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu mengalami peningkatan. Kendala-kendala yang terjadi setelah pelayanan pertanahan menjadi bagian dari Unit Pelayanan terpadu Kabupaten Banyuwangi yaitu pelayanan informasi yang tidak maksimal disebabkan oleh tidak memadainya fasilitas untuk melakukan koordinasi antara petugas loket di Unit Pelayanan Terpadu dengan Kantor Pertanahan. Letak kantor yang berjauhan menyebabkan pegawai Kantor Pertanahan yang bertugas di Kantor Unit Pelayanan Terpadu harus membawa berkas-berkas permohonan dan mengantarnya ke Kantor Pertanahan sehingga menyebabkan ketidak efisienan waktu, tenaga, dan kerawanan terhadap berkas itu sendiri. Selain itu volume permohonan yang tinggi tidak diimbangi dengan jumlah petugas pelayanan pertanahan yang ada di Unit Pelayanan terpadu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	14
C. Hipotesis	19
D. Definisi Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	21
B. Populasi	21
C. Variabel Penelitian	22

C. Jenis dan Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Wilayah	
1. Letak dan Batas Wilayah	27
2. Luas Wilayah dan Tata Pemerintahan	27
B. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi	28
C. Gambaran Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelaksanaan pelayanan umum Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan umum telah menerapkan suatu bentuk pelayanan masyarakat secara terpadu yang dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah Instansi Pemerintah beserta macam pelayanannya masing-masing yang dipusatkan pada satu lokasi/tempat tertentu. Hal ini ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam Instruksi Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 1997 Tentang Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 065/8732/014/1997 Perihal Pembentukan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu. Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu ini telah dilaksanakan di banyak daerah di Jawa Timur seperti di Kabupaten Tulungagung, Probolinggo, Pamekasan, Situbondo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, dan Banyuwangi.

Khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi pelaksanaan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu ini dibentuk dengan nama Unit Pelayanan Terpadu. Dalam pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu ini ditunjuk seorang Koordinator yang bertanggung jawab langsung pada Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi. Unit

Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi ini melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi.

Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi ini berdiri dan diresmikan pada tanggal 31 September 1997 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi Tanggal 30 Maret 1998 No. 188/557/SK/439.014/1997 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Nama Pejabat/Staf yang Bertugas Pada Unit pelayanan Terpadu Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi, dan mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 1 Januari 1998.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat Badan Pertanahan Nasional telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 20 Juli 1998 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi ini sejak tanggal 1 Mei 2001 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 000.353-7-912

Tanggal 27 April 2001 Perihal Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bidang Pertanahan. Baik sebelum dan sesudah menggabungkan loket pelayanannya ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pelayanannya tetap mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 20 Juli 1998.

Secara fisik bentuk Unit Pelayanan Terpadu Bidang Pertanahan ini dilaksanakan dengan memindahkan loket pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Bidang Pertanahan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul : "EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI BAGIAN UNIT PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN BAYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR".

B. Perumusan Masalah

Dengan masuknya pelayanan pertanahan kedalam Unit Pelayanan Terpadu diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja yang lebih baik bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui peningkatan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah menjadi bagian dari Unit Pelayanan Terpadu dapat

dilihat dari perbandingan kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Adanya jarak antara Kantor Pertanahan sebagai pemroses permohonan pelayanan dengan loket pelayanannya yang ada di Unit Pelayanan Terpadu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi akan dihadapkan dengan kendala-kendala dalam alur pelaksanaan kerjanya.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan kinerja pelayanan yang dicapai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah menjadi bagian Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi ?
2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam kaitannya sebagai Unit Pelayanan Terpadu ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang bermacam-macam maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja yang dimaksud adalah sesuatu yang dicapai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:503). Dalam penelitian ini kinerja yang dimaksud adalah hasil-hasil kegiatan pelayanan pertanahan yang

- telah dicapai berdasarkan permohonan yang masuk dan diselesaikan hingga produk akhir pelayanan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
2. Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pelayanan Umum, yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Surat Keputusan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993, butir I)
 3. Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Banyuwangi adalah Unit Pelayanan Terpadu yang menangani dan mengkoordinasikan pelayanan umum baik secara administrasi maupun operasional. (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II banyuwangi Nomor 165 Tahun 1997, pasal 2 butir 5)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan :

- a) Untuk mengetahui perbandingan kinerja pelayanan yang telah dicapai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebelum dan

sesudah menjadi bagian Kantor Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- b) Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam kaitanya sebagai bagian Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

- a) Diharapkan berguna dalam menambah informasi mengenai perkembangan mekanisme pelayanan pertanahan di daerah.
- b) Merupakan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam rangka pelaksanaan tugas dikantor pada masa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa Hipotesis penulis yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan terhadap kinerja pelayanan Kantor Pertanahan setelah menjadi bagian Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyuwangi ini **terbukti**. Hal ini didasari oleh hasil akhir dari uji t terhadap perbandingan persentase kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$.

B. Saran

1. Lingkup kerja Kantor Pertanahan yang telah didukung oleh jaringan komputer Local Area Network sebaiknya diperluas hingga ke lingkup kerja petugas loket yang ada di Unit Pelayanan Terpadu, sehingga lebih memudahkan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan petugas yang ada di Unit Pelayanan Terpadu.
2. Jumlah permohonan sertipikat hak atas tanah yang meningkat sebaiknya diimbangi dengan jumlah petugas loket yang ada di Unit Pelayanan Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2000), *Kinerja Kantor Pertanahan LOC Phase 1*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Cardoso Gomes, Faustinho, (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Harsono, Boedi (2000), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2003), *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Yogyakarta
- Sumanto, (1995), *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, LP3ES, Bandung.
- Walijatun, Djoko. (1999). *Pelayanan Prima Bahan Spamen*. Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN

- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 20 Juli 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Pertanahan.
- Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : AANG SUMARNA
2. NIP : 750 006 704
3. Tempat dan Tgl Lahir : Jakarta, 19 Agustus 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : ISLAM
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat Rumah : Jln. Dwikora Rt.03/III Kec. Warudoyong
Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat
8. Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
9. Alamat Instansi : Jln.Sriwijaya Tanjungpandan
10. Jabatan : Staf Seksi Penatagunaan Tanah
11. Pangkat dan Golongan : Pengatur Muda Tingkat I, Golongan II/a
12. Riwayat Pendidikan : a. SD Lulus Tahun 1991
b. SMP Lulus Tahun 1994
c. STM (Bangunan Survey Pemetaan)
Lulus Tahun 1997
13. Riwayat Pendidikan : a. CPNS, TMT 1Maret 1998
b. Pengangkatan PNS Gol. II/a
TMT 1Juni 1998